

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adhari, Ade, Anis Widyawati, *Hukum Penitensier Di Indonesia: Konsep Dan Perkembangannya*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Arief, Barda Nawawi, Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Badan Narkotika Nasional, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Narkotika Di Indonesia Tahun 1928-1998*, Jakarta: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007.
- Baskoro, Novi E, *Rekonstruksi Hukum terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: Rafika Aditama, 2019.
- Chandra, Tofik Yanuar, *Hukum Pidana*, Jakarta: Singir Multi Usaha, 2022.
- Devi Rahayu, Djulaeka, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Dimyati, Johni, 2013, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2013.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Alumni, 1990.
- Efendi, Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

- Farkhani, Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Hakim, Lukman, 2020, *Penerapan Dan Implementasi Tujuan Pemidanaan Dalam RKUHP Dan RKUHAP*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hiariej, Eddy O.S, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- , *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atama Pustaka, 2015.
- , *Materi Pokok Hukum Pidana*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016.
- , *Materi Pokok Hukum Acara Pidana*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017.
- Hiariej, Eddy O.S, Zainal Arifin Mochtar, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum : Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Hutapea, Bungasan, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pohon Cahaya, 2016.
- Krisnawati, Dani, *et al, Bunga Rampai : Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Madiansyah, Helmi Zaki, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jember: Fakultas Syariah UIN KH Acmad Siddiq, 2021.
- Mamudji, Sri, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mamudji, Sri, Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mertha, I Ketut, *et.al, Buku Ajaran Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2016.
- Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Purba, Nelvitia, *Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Medan: Format Publishing, 2021.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Perss, 2014.
- Rifai, Achmad, *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*, Makasar: Nas Media Pustaka, 2020.
- Rosyadi, Imron, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media, Surabaya, 2022.
- Saleh, Roeslan, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- , *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- , *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2017.
- Santoso, Topo, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers, Depok, 2022.
- Sasangka, Hari, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana (Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkotika)*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Selle, H, Nurul Qamal, *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*, Makasar: Sosial Politic Genius, 2018.
- Sholehudin, Umar, *Hukum Dan Keadilan Masyarakat : Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Malang: Setara Press, 2011.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- , *Pokok -Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sudewi, Ifa, Faisal Akbaruddin, Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, *Rencana Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Tertentu Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Litera, 2023.
- Sudewo, Fajar Ari, *Penologi Dan Teori Pidanaaan*, Tegal, Djawa Sinar Perkasa, 2022.
- Sudrajat, Wahyu, Marcus Priyo Gunarto, *Dekonstruksi Putusan Bebas Dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Suhariyanto, Budi, Lilik Mulyadi, Bettina Yahya, *Urgensi Pedoman Pidanaaan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sumangelipu, Andi Hamzah, *Pidana Mati Di Indonesia : Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Sumardjono, Maria S.W, *Bahan Kuliah : Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2021.
- Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Sutorius, Schaffmeister, Keijzer, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995.

B. Jurnal

- Afifah Fidaus dan Indra Yugha Koswara, “Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan”, *Lex Renaissance*, Vol. 9, No. 1, (Juni 2024).
- Agus Purnomo, “Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 8, No. 1, (2016).
- Aista Wisnu Putra, Rahmi Dwi Sutanti, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, (2020).

- Ajje Ramdan, Rully Herdita Ramadhani dan Mei Susanto, “ Kebijakan Pidana Mati Dalam RKUHP Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum Dan Ham”, *Arena Hukum*, Vol. 11, No. 3, (Desember 2018).
- Atet Sumanto, “Efektivitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika”, *Perspektif*, Vol. 22, No. 1, (Januari 2017).
- Barhamudin dan Hendra, “Pidana Mati Sarana Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, *Universitas Palembang*, Vol. 16, No. 2, (Mei 2018).
- Barhamudin, Hendra, “Pidana Mati Sarana Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, *Universitas Palembang*, Vol. 16, No. 2, (Mei 2018).
- Christofel Brayn Leonard Totomutu, *et.al*, “Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007)”, *Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, (Mei 2021).
- Devi Firmansyah, Zainudin Hasan, “Disparitas Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika,” *Pranata Hukum*, Vol. 15, No. 2, (Juli 2020).
- Devy Iryanthi Hasibuan, *et.al*, “Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *USU Law Jurnal*, Vol. 3, No. 1, (April 2015).
- Fachri Wahyudi, “Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Dalam Pasal 114 Ayat (2) Dan Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam,” *Universitas Islam Indonesia*, Vol. 15, No. 1, (Juni 2021).
- Fathur Rachman, “Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika”, *Pranata Hukum*, Vol. 13, No. 2, (Juli 2018).
- Ferawati, “Kajian Hukum Dan Ham Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 3, (Januari 2015).
- Hamidah Abdurrachman, *et.al*, “ Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkoba”, *Pandecta*, Vol 7, No 2, (Juli 2012).
- I Wayan Wardana, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia”, *Jurnal IUS*, Vol. 2, No. 5, (Agustus 2014).
- Ifahda Pratama Hapsari, “Efektivitaas Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia”, *Jurnal Justiciabelen*, Vol 1, No. 2, (April 2019).

- Marcus Priyo Gunarto, “Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rencana Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1, (2012).
- Marlya Retta Bangun, Surya Perdana, “Disparitas Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir”, *Doktrin Review*, Vol. 1, No. 1, (Desember 2022).
- Mei Susanto dan Ajie Ramdan, “Kebijakan Moderasi Pidana Mati: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 2, (Agustus 2017).
- Muhammad Naim, “Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana Perkara Narkotika”, *Legal Standing*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2018).
- Ngadikun, Hidayatullah, Iskandar Wibawa, “Kedudukan Sanksi Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kebijakan Hukum Pidana)”, *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 18, No. 2, (April 2019).
- Novelinda S. G. Sembel, Wempie Jh. Kumendong, Caecilia J. J. Waha, “Penerapan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Lex Et Societatis* Vol. 8, no. No. 3, (September 2020).
- Nurbaiti Syarif, Winda Yunita, “Analisis Yuridis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Keadilan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* Vol. 20, no. No. 1, (Februari 2022).
- Nuri Andayanti, “Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol.1, No. 1, (Desember 2021).
- Ovilia Yana Pradipta, Mitro Subroto, “Penjatuhan Ancaman Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 4, No. 1, (2021).
- Risqi Perdana Putra, Pujiyono, “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotik Yang Akan Datang (*Ius Constituendum*)”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 3, (2022).
- Robby Anugrah, Raja Desril, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, (2021).

- Roby Anugrah dan Raja Desril, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, (2021).
- Slamet Tri Wahyudi, “Problematisasi Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, (Juli 2012).
- Sugeng Riyadi dan Beny Timor Prasetyo, “Kebijakan Moderasi Pidana Mati Dalam RUU KUHP Perspektif Nilai-Nilai Pancasila,” *Volksgeist*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2021).
- Syamssul Hidayat dan Hasan Asy’ari, “Konstruksi Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal IUS*, Vol. 1, No. 3, (Desember 2013).
- Umar Anwar, “Penjatuan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkotika; Freddy Budiman),” *Legislasi Indonesia* Vol. 13, No. 3, (September 2016).
- Zainab Ompu Jainah, “Analisis Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika,” *Pranata Hukum*, Vol. 14, No.1, (Januari 2019).
- Zainudin Hasan, Devi Firmansyah, “*Disparitas Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*,” *Pranata Hukum*, Vol. 15, No. 2, (Juli 2020).

C. Hasil Penelitian Dan Tugas Akhir

- Bambang Hariyono, “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2009.
- Bintomawi Siregar, 2015, “Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat”, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Budi Suharyanto, 2014, *Penafsiran Hakim Dalam Penerapan Pidana Mati Di Indonesia (Asas, Norma dan Praktik Penerapannya)*, Laporan Penelitian Puslitbang Hukum Dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung RI, 2014.
- Herdjito, “Disparitas Penjatuan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta)”, Laporan

Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung, 2014.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), “Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa”, Penelitian Institute for Criminal Justice Reform, 2017.

Khudzaifah Dimiyati, J. Djohansjah dan Alexander Lay, “Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan”, Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Negeri, Komisi Yudisial RI, 2008.

Kurnia Dewi Anggraeny, “Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Di Pengadilan Negeri Sleman Antara Tahun 2007-2009”, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2013.

Rahmatul Hidayat, 2013, “Kebebasan Hakim Dalam Pedoman Pemidanaan”, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2013.

Roni Edi Wanto, 2014, “Disparitas Penjatuhan Putusan Pidana Oleh Hakim Pada Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak”, Tesis Program Studi Magister Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada, 2014.

Yogi Prasetya Sinambela, 2019, “Disparitas Putusan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika”, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

D. Internet

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, “Menelisik Masalah Disparitas Dan Proporsionalitas Putusan Pengadilan Pidana”, https://www.youtube.com/results?search_query=MENELISIK+MASALAH+DISPARITAS+%26+PROPORSIONALITAS+PUTUSAN+PENGADILAN+PIDANA, (diakses 12 Juli 2024).

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Data Putusan Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>, (diakses 13 September 2023).

Edita Elda, “Pidana Mati Indonesia: Arah Kebijakan Dan Penerapannya di Masa Depan”, Univeritas Andalas, <https://hukum.ump.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/ARTIKEL10.pdf>, (diakses 4 Juni 2024)

Hukum Online, “Disparitas Putusan Dan Pemidanaan Yang Tidak Proporsional”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitasputusan->

*dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional*524a2ce258cb5/?page=1,
(diakses 20 April 2024).

Humas Badan Narkotika Nasional, “BNN Ungkap Dua Kasus Narkotika dan Amankan 110 kg Sabu,” <https://bnn.go.id/bnn-ungkap-dua-kasus-narkotika-dan-amankan-110-kg-sabu/>, (diakses 15 September 2023).

Indonesia Judicial Research Society, “Penelitian Disparitas Pemidanaan Dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia : Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I Tahun 2016-2020 (Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009)”, <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/08/Penelitian-Disparitas-Pemidanaan-dan-Kebijakan-Pidana-Narkotika.pdf>, (diakses tanggal 6 September 2023).

Institute For Criminal Justice Reform, “Menyelesaikan Keadilan Yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia”, <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2019/01/Menyelisik-Keadilan-Yang-Rentan.pdf>, (diakses 1 Oktober 2023).

Institute For Criminal Justice Reform, “Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati Di Indonesia 2022 : Tak Ada Yang Terlindungi”, <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/04/Laporan-Hukuman-Mati-Tak-Ada-yang-Terlindungi.pdf>, (diakses 1 Oktober 2023)

MaPPI FH UI, “Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia”, https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/02/Buku-Bunga_Rampai-Rev-1.pdf, (diakses 23 Juli 2024).

Nafja Livia Avissa, “Moratorium Pidana Mati Dalam KUHP: Jalan Tengah Kontroversi Abolisionis dan Retensionis”, Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/moratorium-pidana-mati-dalam-kuhp-jalan-tengah-kontroversi-abolisionis-dan-retensionis/>, (diakses 23 Juli 2024).

Pengadilan Negeri Tarakan, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tarakan,” https://sipp.pn-tarakan.go.id/detil_perkara, (diakses tanggal 11 Januari 2024).

PUSLITDATIN Badan Narkotika Nasional, “Indonesia Drugs Report 2022”, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahahan/2022/07/IDR-2022.pdf>, (dikases 1 September 2023)

Unite Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), “Laporan Narkoba Dunia UNODC 2023 Memperingatkan Akan Terjadinya Konvergensi Krisis Seiring Dengan Meluasnya Pasar Obat-Obatan Terlarang”, <https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2023/June/unodc-world-drugreport-2023-warns-of-converging-crises-as-illicit-drug-markets-continue-to-expand.html?testme>, (diakses 9 Januari 2023).

Yuddin Chandra Nan Arief, “Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Positif Indonesia”, <http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-artikel/tindak-pidana-narkotika-dalam-hukum-positif-indonesia>, (diakses 23 Oktober 2023).

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang *Pengesahan United Nations Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
- Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum
- Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;

F. Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 2-3/PUU-V/2007, Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 23 Oktober 2007.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1487/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr, perihal putusan tingkat pertama perkara Ichsanul Akbar bin Muhamad Hanafi, 15 April 2020.
- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 249/Pid.Sus/2020/PT.DKI, perihal banding perkara Ichsanul Akbar bin Muhamad Hanafi, 29 Juni 2020.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1085 K/Pid.Sus/2021, perihal kasasi perkara Ichsanul Akbar bin Muhamad Hanafi, 18 Oktober 2021.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1486/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr, perihal putusan tingkat pertama perkara Syukur Hindarto Bin Alm Karno Hadi, 13 April 2020.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 248/Pid.Sus/2020/PT DKI, perihal banding perkara Syukur Hindarto Bin Alm Karno Hadi, 29 Juni 2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 995 K/Pid.Sus/2021, perihal kasasi perkara Syukur Hindarto Bin Alm Karno Hadi, 29 April 2021.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 450/Pid.Sus/2014/ PN.Jkt.Utr, perihal putusan tingkat pertama perkara Yanto, 26 Agustus 2014.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 267/PID/2014/PT.DKI, perihal banding perkara Yanto, 12 November 2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1361/Pid.Sus/2015, perihal kasasi perkara Yanto, 30 Juni 2015.